

## **PSEUDO AKTOR POLITIK (Studi Genealogi Kekuasaan di Sulawesi Tenggara Indonesia)**

Misran Safar

Mahasiswa S3 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar,  
Makassar Sulawesi Selatan Indonesia, email: [misran.safar@yahoo.com](mailto:misran.safar@yahoo.com)

Andi Agustang

Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Makassar, Makassar Sulawesi  
Selatan Indonesia, email: [andiagust63@gmail.com](mailto:andiagust63@gmail.com)

Arlin Adam

Dosen Sosiologi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Makassar  
Sulawesi Selatan Indonesia. Email: [arlin\\_adam@yahoo.com](mailto:arlin_adam@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri, menggali informasi dan mengkaji secara mendalam tentang pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai *human instrument* dan *key instrument*. Data yang dikumpulkan meliputi terjadinya pseudo aktor politik, pola, dinamika, implikasinya terhadap relasi kuasa; dan formasi wacana yang berkembang dan perlu dikembangkan dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni sepanjang proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pseudo aktor politik dalam kekuasaan disebabkan hasrat kuasa yang muncul dalam situasi sosial politik dan kepentingan yang saling bertentangan pada setiap periodisasi awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi; (2) pola pseudo aktor politik dalam kekuasaan, menunjukkan wujudnya dalam dua bentuk yakni perlawanan pasif dan negosiasi pada setiap periodisasi; (3) dinamika pseudo aktor politik dalam kekuasaan, menunjukkan transformasi dalam dua kecenderungan, yakni eskalasi dan deeskalasi pada setiap periodisasi; (4) implikasi pseudo aktor dalam kekuasaan terhadap relasi kuasa melahirkan tiga bentuk relasi yakni: relasi kuasa tubuh, relasi kuasa pemikiran dan relasi kuasa oligarkhi, yang memiliki variasi dalam setiap periodisasi awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi; dan (5) formasi wacana dalam panggung kekuasaan, berkembang menyesuaikan kebutuhan dan tantangan pada setiap periodisasi kuasa. Sedangkan formasi wacana yang perlu dikembangkan dalam mendorong terciptanya originalitas aktor atau aktor yang memiliki strategi adaptif etik untuk kuasa kebajikan, adalah wacana integritas “aktor” yang dilandasi nilai-nilai religius, budaya dan moral yang mencerminkan adab yang tinggi dan karsa yang kuat.

Kata kunci: Pseudo, Aktor Politik, Relasi Kuasa dan Formasi Wacana

### **Pendahuluan**

Fenomena tentang aktor telah lama menjadi kajian yang menarik dalam berbagai perspektif seperti telah dilakukan Goffman (1959), Parsons (1962/1965), Hadisz (2004), Dwipayana (2004), Zuhro (2009), Coleman (2011), Pruitt dan Rubin

(2011), Fahmid (2012), Amanda G. (2014) dan Sjaf (2014). Namun kajian tentang pseudo aktor politik dalam kekuasaan merupakan fenomena baru yang membutuhkan perhatian dan bahkan belum pernah dikaji secara sistematis.

Kecenderungan terjadinya pseudo aktor politik dalam kekuasaan di daerah sampai pada skala tertentu memiliki kaitan dengan perkembangan kekuasaan yang terbentuk oleh penjajah dan diperkuat oleh pemerintahan orde lama, orde baru, termasuk kondisi negara Indonesia yang sedang mengalami transisi dari bentuk otoritarian menuju demokrasi dan dari sentralistik menjadi desentralisasi kekuasaan. Kasus kontestasi pemimpin di daerah melalui berbagai mekanisme mulai dari pengangkatan dan penunjukkan oleh pemerintah pusat, pemilihan melalui lembaga perwakilan di daerah yang kemudian mendapatkan pengesahan pemerintah pusat sampai dengan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan proses transisi kekuasaan dan selalu menarik perhatian dan energi sosial dari semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar strata sosial, budaya dan ekonominya.

Sebagai momentum untuk melakukan transisi kekuasaan, berbagai mekanisme rekrutmen pemimpin di daerah pada level provinsi yang pernah dilaksanakan selalu melahirkan kompetisi antar aktor dari berbagai latar belakang, karena itulah kontestasi ini selalu berkaitan atau dikaitkan dengan asal usul etnis, penguasaan aset-aset sosial, budaya dan ekonomi, termasuk kapabilitas intelektual dan keperibadian “aktor” calon pemimpin. Konsekuensi yang muncul pasca kontestasi tersebut adalah *euforia* kemenangan bagi aktor dan kelompoknya yang mendapatkan kepercayaan, dan sebaliknya kekecewaan dan ketidaksiapan dari aktor beserta pendukungnya bagi mereka yang gagal memperoleh kesempatan dan akses terhadap kuasa.

Kondisi kontradiktif *euforia* dan kekecewaan tersebut, mendorong aktor politik melakukan berbagai strategi, manuver, teknik dan bahkan perilaku semu “pseudo” untuk mempertahankan dan mengembangkan aksesnya terhadap kuasa. Karena itu Foucault (2002) menyatakan bahwa individu-individu adalah kendaraan kekuasaan, dan bukan sebatas titik aplikasi. Kuasa melibatkan permainan-permainan strategi di antara pihak-pihak yang memiliki kebebasan memilih (Foucault, 1980), dan kuasa selalu ada dalam interaksi sosial, ada dimana-mana dan bisa dijalankan oleh siapapun (Mills, 1999; Hindess, 1996).

Secara lebih spesifik berbagai mekanisme rekrutmen pemimpin di level provinsi Sulawesi Tenggara kompetisi antara aktor politik dengan latar belakang etnis sangat menonjol, terutama antara etnis daratan yang diwakili oleh etnis Tolaki (Konawe-Mekongga) dan kepulauan yang diwakili oleh etnis (Buton dan Muna), bahkan dijadikan *doxa* (wacana dominan) geopolitik untuk membangun afiliasi dan berbagai komitmen politik lainnya. Afiliasi dan komitmen yang telah terbangun pasca kontestasi kekuasaan, dalam realitasnya seringkali terabaikan (Fahmid, 2012), karena hadirnya aktor-aktor baru “kompetitor sebelumnya” yang menyatakan dukungan atau secara struktural dan fungsional akan dijadikan mitra dalam rangka soliditas pada panggung kekuasaan. Kondisi inilah yang kemudian memberi ruang berkembangnya pseudo aktor, karena pada momentum yang hampir bersamaan menjadi kompetitor sekaligus menjadi mitra dalam relasi yang perlu diberi dukungan dan kesempatan. Sementara itu pada kutub yang sama sejumlah aktor

yang telah berjuang, harus menerima realitas bahwa di antara mereka “karena alasan soliditas dan stabilitas” maupun posisi struktural pemerintahan “tersisih” dalam posisi-posisi strategis maupun dalam distribusi dan alokasi nilai-nilai kuasa.

Kontestasi antara aktor politik untuk mendapatkan distribusi dan alokasi nilai-nilai, sebenarnya berlangsung antara strata sosial atas (*upper class*), namun tidak dapat dipungkiri keterlibatan strata sosial menengah (*middle class*) dan strata sosial bawah (*lower class*) secara politik, ekonomi dan pendidikan turut berkontribusi besar, terutama dalam upaya mereka melakukan transformasi strata sosialnya secara individual maupun kelompoknya. Situasi masa transisi inilah yang penuh dinamika, negosiasi dan implikasi yang dapat memunculkan resiko pseudo aktor politik dalam membangun, mereproduksi dan mempertahankan kuasa melalui diskursus, karena kemungkinan munculnya dukungan politik masyarakat yang kontra produktif dan dapat memicu berkembangnya konflik manifest yang bersifat horisontal.

Perhatian terhadap para aktor politik dalam kekuasaan semakin penting, apabila dikaitkan dengan budaya politik lokal, aktor adalah *agency* budaya. Sebagai *agency* budaya disatu sisi aktor merupakan penerus nilai-nilai budaya politik yang tumbuh dan berkembang di ranah lokal. Namun disisi lain aktor juga merupakan produsen (kreator) budaya, di mana perilaku politik aktor memengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal. Dengan demikian dinamika aktor politik di ranah lokal sangat terkait dengan pola jaringan aktor-aktor politik nasional (Zuhro, 2009). Konteks kekuasaan di Sulawesi Tenggara, baik secara historis dan sosiologis menampilkan aktor-aktor politik yang berkolaborasi antara “daratan” dan “kepulauan” atau sebaliknya, yang menunjukkan adanya simbolisasi peran dan kontribusi kerajaan besar yang pernah eksis di Sulawesi Tenggara, sekaligus mencerminkan adanya kesinambungan (*continuity*), keberlanjutan (*sustainability*) dan perubahan-perubahan (*changes*) dalam dinamika, bahkan memiliki implikasi dalam perkembangan kekuasaan. Oleh karena itu deskripsi diakronik dan sinkronik dari pseudo aktor politik dalam kekuasaan patut memperoleh perhatian, karena aktor-aktor inilah yang telah menjadi penyeru, pemimpin dan pelaksana dari kekuasaan (Shils, 1972).

Besarnya perhatian terhadap berbagai kontestasi dan mekanisme mempertahankan akses dalam kekuasaan mendorong setiap aktor politik dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, untuk memilih berbagai alternatif perlawanan, penolakan dan bahkan konflik “semu” dan atau menerima, menyetujui, memberi dukungan dan solidaritas “semu”, kondisi inilah yang memberi ruang bagi berkembangnya pseudo aktor politik. Bahkan transformasi pola, dinamika dan implikasi pseudo aktor dalam kekuasaan di daerah akan tampak kurang jelas jika kita berusaha memahaminya dalam konteks studi-studi yang telah dilakukan mengenai aktor politik, dinamika politik, politik etnik, identitas kekuasaan, dan kontestasi kekuasaan di daerah. Lebih dari itu kajian yang terfokus pada masalah pseudo aktor dalam kekuasaan di daerah dihubungkan dengan periodisasi awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi penting untuk dilakukan. Karena itulah, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) mengapa pseudo aktor politik terjadi dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara?; (2) bagaimana pola pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara?; (3) bagaimana dinamika pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara?; (4) bagaimana

implikasi pseudo aktor dalam panggung kekuasaan di Sulawesi Tenggara terhadap relasi kuasa?; dan (5) bagaimana formasi wacana dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data atau berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2010). Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai *human instrument* dan *key instrument*,

Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Tenggara dengan menetapkan secara *purposive* Kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai lokasi penelitian. Subyek penelitian yang dijadikan sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah para aktor yang memiliki aktivitas politik dan para tokoh masyarakat, tokoh budaya yang merasakan, mengalami dan bahkan melakukan tindakan pseudo dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara. Penentuan subyek penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive* atau *judgemental* (Black & Champion, 1992). Jumlah informan penelitian ini sebanyak 19 orang yang ditetapkan secara proporsional sesuai dengan fakta yang diteliti dan tingkat kejenuhan informasi yang dibutuhkan. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan, memaparkan, memahami, mengkaji dan menganalisis permasalahan mengapa pseudo aktor terjadi, pola, dinamika, implikasi terhadap relasi kuasa dan formasi wacana yang berkembang dan perlu dikembangkan dalam kekuasaan.

Sumber data primer penelitian ini adalah para informan yang memiliki aktivitas politik, pemerintahan, sosial dan budaya, sejak awal kemerdekaan, orde baru, serta reformasi dan informan kunci, yakni pejabat dan mantan pejabat politik Provinsi Sulawesi Tenggara, birokrat dan mantan birokrat tinggi provinsi Sulawesi Tenggara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) Republik Indonesia dan mantan anggota DPR/MPR Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, pimpinan Partai Politik dan mantan pimpinan Partai Politik dominan Provinsi Sulawesi Tenggara, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sumber data sekunder dari dokumentasi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, data Badan Pusat Statistik (Sulawesi Tenggara Dalam Angka), media cetak dan elektronik, hasil-hasil penelitian dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis data penelitian dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, dengan tahapan: (1). menelaah seluruh data yang telah diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahaminya; (2). mereduksi data dengan cara abstraksi (menganalisis dan merangkum intisari data); (3). menyusun data dalam satuan atau klasifikasi; (4). satuan itu dikategorisasi sambil membuat koding; dan (5). memeriksa keabsahan data.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara**

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara terjadi disebabkan motif keinginan kuasa, mempertahankan dan mengembangkan prestise, serta orientasi individual aktor yang muncul dalam situasi sosial politik dan kepentingan yang “kontradiktif” pada setiap periodisasi kekuasaan, yakni awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi.

Keinginan kuasa sebagai penyebab pseudo aktor pada awal kemerdekaan, dimotivasi oleh kebiasaan memperlihatkan loyalitas kepada penjajah sekaligus mendukung upaya-upaya melepaskan diri dari penjajahan, kemudian sikap mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada satu sisi dan memberi ruang bagi pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pengacau keamanan pada sisi yang lain, kondisi dualisme pemerintahan (pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan tradisional) yang dihadapi aktor. Periodisasi Orde Baru, termotivasi kondisi yang menuntut kemampuan aktor untuk mengakomodasi kepentingan yang saling bertentangan antara lokal “daerah” dan kepentingan pemerintah pusat. Sedangkan periodisasi reformasi, aktor diperhadapkan pada perjuangan antara berbagai kepentingan yang berbeda, kebijakan partai versus kepentingan konstituen dan masyarakat pada umumnya.

Mempertahankan dan mengembangkan prestise menunjukkan signifikasinya terhadap motif sehingga memunculkan pseudo aktor pada awal kemerdekaan, didorong oleh kondisi ketidakstabilan pemerintahan yang mudah mengalami perubahan dan atau pergantian serta loyalitas ganda pada pimpinan yang berbeda yakni kepala pemerintahan negeri dan kepala pemerintahan swapraja. Periodisasi Orde Baru, dimotivasi loyalitas kepada pimpinan pemerintahan dan pimpinan organisasi sosial politik dominan di daerah, termasuk loyalitas terhadap pimpinan organisasi di tingkat pusat yang memiliki akses langsung terhadap pusat kekuasaan. Sedangkan pada periodisasi reformasi, didorong dua hal, yakni melakukan pendekatan secara personal, kekerabatan dan kesamaan partai dan organisasi pada satu sisi dan berupaya meningkatkan kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya melalui jaringan partai, organisasi dan kekerabatan pada sisi lain.

Orientasi individual aktor menunjukkan signifikansi pada awal kemerdekaan dalam bentuk penonjolan dan penggabungan kepentingan pribadi dan kolektif dalam momentum yang sama. Periodisasi Orde Baru, terbatasnya ruang untuk memberikan pandangan yang realitis terhadap program dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk organisasi politik tingkat nasional pada satu sisi dan pentingnya memberikan jaminan dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat di daerah. Periodisasi reformasi, terbukanya ruang berbagai kepentingan partai, kelompok kepentingan (*interest group*) dan masyarakat dalam memberikan kontrol, mendorong aktor untuk menempuh jalan penyelamatan kepentingan individu.

### **2. Pola pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara**

Pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara, menunjukkan pola dalam dua bentuk yakni *pertama* perlawanan pasif yang meliputi perlawanan kecil-

kecilan, inkonsistensi, serta produksi dan reproduksi wacana anti penguasa, sedangkan yang *kedua* negosiasi, yang meliputi negosiasi untuk meminta konsesi dan negosiasi intimidasi atau membuat ancaman kepada aktor lainnya, yang muncul dalam setiap periodisasi kekuasaan, yakni periodisasi awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi.

Perlawanan pasif, pada awal kemerdekaan dilakukan aktor politik melalui tindakan diam-diam, atau berbeda yang ditampilkan dan dinyatakan dihadapan pimpinan, kelompoknya, dan dihadapan masyarakat, yang berkaitan dengan ketidakjelasan mekanisme pertanggung jawaban kewenangan pemerintah pusat di daerah, termasuk perubahan kelembagaan dan struktur pemerintahan yang sangat dinamis, diikuti produksi dan reproduksi wacana penindasan penduduk lokal oleh penduduk pendatang. Pada periodisasi Orde Baru, perlawanan pasif ditunjukkan melalui kegiatan dan pelaksanaan tugas yang berbeda dari kapasitas karena kebijakan yang bersifat sentralistik baik dalam bentuk program pembangunan maupun rekrutmen dan penentuan posisi aktor di daerah, kemudian inkonsistensi dalam pelaksanaan dan realisasi kebijakan pemerintah pusat yang sesungguhnya belum dibutuhkan masyarakat di daerah serta pengembangan wacana mengenal dan dikenal sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dominannya campur tangan pemerintah pusat. Inkonsistensi aktor politik di daerah tidak dapat dilepaskan dari posisi subordinasi dalam kekuasaan. Kondisi inilah yang menurut Bhabha (1994) memunculkan ambivalensi, ketika yang tidak memegang kuasa tanpa meyakini terhadap kebenaran yang dijalankan pemegang kuasa. Periodisasi reformasi, perlawanan pasif ditunjukkan melalui “kolaborasi” terselubung dengan kelompok penguasa dalam struktur dan diluar struktur pemerintahan yang dianggap berseberangan dalam kontestasi kekuasaan maupun kelompok yang terpinggirkan pasca distribusi dan alokasi nilai-nilai, termasuk transparansi dalam rekrutmen yang melahirkan aktor yang kurang memahami ideologi perjuangan organisasi dan partai serta pengembangan wacana kepentingan lokal, kearifan lokal dan putra daerah sebagai strategi untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap mekanisme rekrutmen yang regulasinya tetap dominan melibatkan pemerintah pusat.

Negosiasi sebagai salah satu pola pseudo aktor pada awal kemerdekaan, menunjukkan adanya berbagai aktor dan kelompoknya meminta konsesi dari lawan berunding “aktor dan kelompok” atas setiap permintaan pihak lain yang akan dipenuhi, kasus penentuan dan penunjukkan ketua Swapraja pada setiap daerah di Sulawesi Tenggara pasca ditiadakannya anggota hadat, penempatan ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara di Bau-Bau dan penempatan Komando Angkatan Perang di Kendari, demikian pula persetujuan pemerintah swapraja Buton terhadap usulan pembentukan Kabupaten Sulawesi Timur (wilayah daratan), termasuk tarik-menarik antara kepentingan daerah, nasional dan kepentingan pribadi aktor. Periodisasi Orde Baru, penerimaan kebijakan dan program pemerintah pusat adalah konsesi untuk tetap mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat, karena realitas menunjukkan bahwa pelaksanaannya relatif tidak sesuai yang diharapkan, demikian pula pemberian penguatan tercapainya kepentingan kelompok dan pribadi aktor dalam memperkuat posisi dan dominasinya. Reformasi, konsesi cenderung lebih terbuka dan tujuannya bukan hanya untuk kepentingan individu aktor, tetapi juga untuk partai politik dan kelompok penekan lainnya. Kondisi ini relevan dengan pernyataan Goldman dan Rojot (2002) bahwa dalam negosiasi terkandung *power*

dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses negosiasi, setiap pihak yang terlibat dalam proses negosiasi juga memiliki ketergantungan terhadap *power* yang lainnya, dan adanya sumberdaya yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

### **3. Dinamika pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara,**

Pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara, menunjukkan dinamika dalam dua kecenderungan, yakni: *pertama*, eskalasi dalam bentuk argumentasi persuasif dan memberi tekanan pada penguasa, dan *kedua*, deeskalasi dalam bentuk tumbuhnya saling ketergantungan dan terbangunnya kepercayaan, yang memiliki karakteristik pada setiap periodisasi awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi.

Eskalasi pseudo aktor pada awal kemerdekaan, menunjukkan wujudnya dalam bentuk mengemukakan dan mempertahankan argumentasi dengan tujuan untuk meyakinkan aktor “pihak lain” agar menurunkan aspirasinya dalam memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok, utamanya pada kondisi dualisme lembaga dan pimpinan pemerintahan di daerah, sedangkan tekanan pada penguasa dilakukan untuk memperjuangkan posisi-posisi strategis pada lembaga pemerintahan. Periodisasi orde baru, argumentasi persuasif dilakukan untuk memberi penguatan pada kepentingan aktor yang mengendalikan kuasa atau kelompok penguasa, sedangkan tekanan kepada penguasa dilakukan melalui mekanisme memperlambat dan memberikan berbagai koreksi, terhadap berbagai kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Periodisasi reformasi, argumentasi dilakukan untuk memperjuangkan posisi dan kepentingan diri “aktor” dan kelompoknya (partai dan konstituennya), sedangkan tekanan akan diberikan untuk memenangkan kompetisi dalam proses rekrutmen jabatan administrasi dan posisi strategis lainnya.

Deeskalasi pseudo aktor pada awal kemerdekaan, terjadi karena saling ketergantungan dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan adanya upaya menekan penonjolan kepentingan pribadi untuk mewujudkan tujuan bersama. Periodisasi Orde Baru, dibutuhkan sinergisitas dan kerjasama dalam melaksanakan program pemerintah pusat di daerah, termasuk membangun kerjasama dan menjaga dukungan serta kepercayaan pemerintah pusat. Periodisasi reformasi, menciptakan saling ketergantungan dan kerjasama antar aktor dalam melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan, termasuk kemampuan membangun kepercayaan yang berkaitan dengan kepentingan dan tujuan bersama diantara aktor dalam lembaga pemerintahan maupun terhadap konstituen dan masyarakat pada umumnya. Kondisi inilah yang disebut Hodge dan Anthony (1988) bahwa kerjasama yang saling menguntungkan (*symbiotic cooperation*) mendorong terciptanya saling ketergantungan.

### **4. Implikasi pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara terhadap relasi kuasa**

Implikasi pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara terhadap relasi kuasa melahirkan tiga bentuk relasi yakni: relasi kuasa tubuh, relasi kuasa pemikiran dan relasi kuasa oligarkhi, yang memiliki variasi dalam setiap periodisasi kekuasaan, yakni awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi.

Relasi kuasa tubuh pada awal kemerdekaan dalam bentuk penyatuan dan kebersamaan aktor dalam mempertahankan kemerdekaan, menyatukan tindakan

yang “dipaksa” oleh kesepakatan bersama termasuk regulasi dan pemahaman pentingnya mempertahankan kemerdekaan, serta mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban. Periodisasi Orde Baru dibentuk oleh regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang cenderung represif dan militeristik. Periodisasi reformasi menunjukkan kepatuhan aktor dalam berperilaku sesuai aturan main dan standar norma “budaya” yang telah disepakati bersama. Regulasi dan standar norma tersebut, memperlihatkan bagaimana wacana diproduksi, siapa yang memproduksi, dan apa efek dari produksi wacana (Foucault, 2002a). Hal ini adalah indikasi bahwa penyelenggaraan kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya, dan setiap kekuasaan disusun, diamankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Bahkan Foucault (1972), menegaskan mengenai pembentukan regulasi-regulasi diskursus (*the discursive regularities*), yang meliputi aspek produksi objek, produksi modalitas penyampaian, produksi konsep-konsep, dan produksi berbagai strategi.

Relasi kuasa pemikiran pada awal kemerdekaan menunjukkan adanya upaya memanipulasi pemikiran melalui manipulasi sejarah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, yang berkaitan dengan peran dan kontribusi aktor dan kelompoknya. Periodisasi Orde Baru, memanipulasi sejarah dan melakukan kontrol terhadap relasi kuasa melalui berbagai wacana dan regulasi. Periodisasi reformasi adanya regulasi yang mengontrol aktor maupun melalui pengungkapan kondisi masa lalu yang lebih baik dari kondisi saat ini. Implikasi relasi kuasa pemikiran menegaskan kembali pernyataan Foucault (1979) dan Pasewark (1993) bahwa pengetahuan itu tak terpisahkan dari kuasa, karena kuasa saat ini (*modern power*) memasuki semua aspek kehidupan sosial dan pengetahuan dipahami sebagai sebuah instrumen sekaligus efek dari kuasa.

Relasi kuasa tubuh dan relasi kuasa pemikiran, relevan dengan pernyataan Foucault (1990) bahwa kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*). Kesepakatan dan regulasi adalah mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh.

Relasi kuasa oligarkhi pada periodisasi awal kemerdekaan merupakan kelanjutan dari kondisi sebelum kemerdekaan, yakni tampilnya minoritas aktor yang menguasai pemerintahan, mereka memiliki dan memperoleh status sosial secara *acribed status*, kemudian aktor yang aktif melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekaligus sebagai Ketua-ketua swapraja dan neoswapraja, dan selanjutnya menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD), bahkan setelah terbentuk Kabupaten Daerah Sulawesi Tenggara aktor-aktor ini memimpin kewedanan atau direkrut dalam struktur pemerintahan negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada periodisasi Orde Baru relasi kuasa mempraktekkan konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok aktor atau oligarkhi kekuasaan yang bersifat *monopolar oligarchy*. Konsentrasi kekuasaan pada satu kutub “eksekutif” di periodisasi Orde Baru terjadi karena berbagai alasan: *pertama*, proses rekrutmen “Gubernur dan Sekda” sangat dominan ditentukan pemerintah pusat; *kedua*, direkat oleh ikatan partai keduanya

mendapatkan persetujuan partai penguasa, sekaligus sebagai unsur pengurus Golongan Karya (pembina); *ketiga*, menjalin hubungan yang telah lama “pertalian personal” dalam pemerintahan maupun organisasi bentukan pemerintah pusat atau organisasi pendiri dan didirikan Golongan Karya.

Relasi kuasa oligarkhi pada periodisasi reformasi memberikan ruang yang besar bagi penguatan politik lokal di daerah, karena adanya otonomi, demokrasi dan desentralisasi. Namun, otonomi yang dilahirkan oleh reformasi belum dapat merealisasikan spirit demokrasi yang dikandungnya tetapi semakin memberikan ruang untuk terjebaknya relasi kuasa antar aktor dalam bagi-bagi kekuasaan. Keterjebakan dalam relasi kuasa ini tak pelak lagi membangkitkan dan memberikan ruang bagi kekuatan lama untuk bermetamorfosis dan kembali masuk berinteraksi serta mengambil bagian dalam relasi kuasa antar aktor. Relasi kuasa oligarkhi yang lama terbangun kembali, meskipun dengan poros yang lebih mendekati apa yang disebut dengan *bi-polar oligarchy* atau konsentrasi kekuasaan yang berporos pada dua kutub. Lembaga eksekutif “satu poros” terdapat tiga aktor (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah), sedangkan pada poros lainnya atau lembaga legislatif terdapat tiga aktor (Ketua dan dua orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang memiliki kepentingan dan sumber daya politik yang berbeda, namun relasi antara kedua lembaga ini beserta aktor-aktornya dapat dikatakan cukup solid. Akan tetapi diluar struktur formal pemerintah daerah “Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” masih tetap ada beberapa aktor “*shadow political*” yang berperan sebagai pemangku otoritas informal, dimana mereka baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Relasi kuasa oligarkhi merupakan kebaruan dari penelitian ini dalam arti bahwa kekuasaan yang bersifat distributif dalam suatu periodisasi tidak sekedar memunculkan relasi kuasa tubuh dan pemikiran tetapi juga memberikan ruang muncul dan berkembangnya relasi kuasa oligarkhi. Relasi ini menunjukkan adanya sekelompok orang “aktor politik” yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi kekuasaan besar.

##### **5. Formasi wacana dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara yang berkembang**

Formasi wacana dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara yang berkembang menyesuaikan kebutuhan dan tantangan pada setiap periodisasi perkembangan kuasa di daerah, seperti persatuan dan kesatuan serta stabilitas keamanan pada awal kemerdekaan, kemudian wacana pembangunan, stabilitas politik dan integrasi nasional pada periodisasi Orde Baru dan wacana pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan pada periodisasi reformasi.

Wacana-wacana ini telah berhasil memperkuat kuasa dan menjadi konsep panoptik dalam setiap periodisasi perkembangan kekuasaan, akan tetapi memberi ruang bagi tumbuhnya pseudo aktor dalam panggung kekuasaan. Sedangkan formasi wacana yang perlu dikembangkan untuk mendorong terciptanya originalitas aktor atau aktor yang memiliki “strategi adaptif etik” yang dapat melahirkan kuasa kebajikan, diperlukan komitmen dan konsistensi aktor dalam produksi dan reproduksi wacana integritas yang dilandasi nilai-nilai religius, budaya dan moral yang mencerminkan adab yang tinggi dan karsa yang kuat.

Aktor yang mampu melahirkan kuasa kebajikan adalah mereka yang mampu mengaplikasikan cara berpikir, bertindak dan berperilaku berdasarkan Adab Tinggi dan Karsa Kuat, atau aktor yang jujur, konsisten dalam ucapan dan tindakan, amanah, mendahulukan kepentingan umum serta aktivitas yang dilakukan dianggap sebagai ibadah serta berkonsekuensi munculnya “*freedom in submissiveness*” dalam panggung kekuasaan.

Formasi wacana yang berkembang dan perlu dikembangkan tersebut, merupakan alat dan media untuk menyebarkan kuasa pada setiap periodisasi dalam kekuasaan dan memiliki variasi dari satu periodisasi ke periodisasi berikutnya. Kondisi ini telah dijelaskan Foucault (2002a) bahwa formasi-formasi diskursif “*bentuk-bentuk pernyataan*” itu berbeda-beda dan berada dalam kurun waktu yang berlainan pula serta adanya sekelompok relasi yang terjadi antar pernyataan-pernyataan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa formasi-formasi wacana yang berkembang pada setiap periodisasi dalam kekuasaan belum dapat menciptakan originalitas aktor atau aktor yang memiliki strategi adaptif etik dan dapat mendorong kuasa untuk kebajikan. Karena itu penelitian ini menemukan bahwa untuk terciptanya originalitas aktor atau aktor yang memiliki strategi adaptif etik dalam kekuasaan diperlukan formasi wacana integritas. Wacana integritas aktor dimaksudkan sebagai penggambaran perpaduan dari komponen kapasitas, mutu, kewibawaan, kejujuran dan kesadaran yang tinggi. Wacana ini harus dilandasi *values* yang bersumber dari nilai-nilai religius, budaya dan moral, sesuai teori ADAB-KARSA “Adab Tinggi dan Karsa Kuat dari Soewardi (1998). Demikian pula pandangan Habermas (2007) bahwa pernyataan seseorang akan selalu berkaitan dengan tatanan dunia sosial yang berhubungan dengan dimensi normatif, yakni kebenaran (*truth*), ketepatan (*normative rightness*), dan kejujuran (*truthfulness*). Artinya klaim akan kebenaran mengacu pada tatanan dunia objektif di mana pernyataan seseorang harus memiliki kesesuaian dengan kenyataan faktual-empiris.

## **Simpulan**

1. Pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara disebabkan hasrat kuasa dalam bentuk motif kuasa, prestise dan orientasi individual, yang muncul dalam situasi sosial politik dan kepentingan yang “kontradiktif” pada setiap periodisasi kekuasaan.
2. Pola pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara, menunjukkan dua bentuk yakni *pertama* perlawanan pasif yang meliputi perlawanan kecil-kecilan, inkonsistensi, serta produksi dan reproduksi wacana anti penguasa, sedangkan yang *kedua* negosiasi, yang meliputi negosiasi untuk meminta konsesi dan negosiasi intimidasi atau membuat ancaman kepada aktor lainnya, yang muncul dalam setiap periodisasi kekuasaan.
3. Dinamika pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara pada periodisasi awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi mengalami transformasi dalam dua kecenderungan, yakni: *pertama*, eskalasi dalam bentuk argumentasi persuasif dan memberi tekanan pada penguasa, dan *kedua*, deeskalasi dalam bentuk tumbuhnya saling ketergantungan dan terbangunnya kepercayaan.

4. Implikasi pseudo aktor politik dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara terhadap relasi kuasa pada periodisasi awal kemerdekaan, orde baru dan reformasi melahirkan tiga bentuk relasi yakni: relasi kuasa tubuh, relasi kuasa pemikiran dan relasi kuasa oligarkhi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang bersifat distributif dalam suatu periodisasi kekuasaan tidak sekedar memunculkan relasi kuasa tubuh dan pemikiran seperti diungkapkan Foucault, tetapi juga memberikan ruang muncul dan berkembangnya relasi kuasa oligarkhi.

5. Formasi wacana dalam kekuasaan di Sulawesi Tenggara yang berkembang menyesuaikan kebutuhan dan tantangan pada setiap periodisasi perkembangan kuasa di daerah, seperti persatuan dan kesatuan serta stabilitas keamanan pada awal kemerdekaan, kemudian wacana pembangunan, stabilitas politik dan integrasi nasional pada periodisasi Orde Baru dan wacana pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan pada periodisasi reformasi. Wacana-wacana ini telah berhasil memperkuat kuasa dan menjadi konsep panoptik dalam setiap periodisasi perkembangan kekuasaan, akan tetapi memberi ruang bagi tumbuhnya pseudo aktor dalam panggung kekuasaan. Sedangkan formasi wacana yang perlu dikembangkan untuk mendorong terciptanya originalitas aktor atau aktor yang memiliki strategi adaptif etik dan dapat melahirkan kuasa kebajikan, diperlukan komitmen dan konsistensi aktor dalam produksi dan reproduksi wacana integritas yang dilandasi nilai-nilai religius, budaya dan moral yang mencerminkan adab yang tinggi dan karsa yang kuat.

#### **Daftar Pustaka**

- Amanda G, Ni Made Ras. 2014. *Pertarungan Aktor Politik Di Media Cetak Dalam Pemilukada Bangli 2010. Disertasi*. Bali: Prodi Kajian Budaya PPS Universitas Udayana
- Bhabha. Homi K. 1994. Introduction: Locations of Culture. *In The Location of Culture*. London: Routledge.
- Black, James A. & Dean J. Champion. 1992. *Methods and Issues In Social Research*. Di Indonesiakan E. Koeswara dkk. Bandung: Eresco.
- Cresweel, John W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Coleman, James S. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*. (terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Dwipayana, AA GN Ari. 2004. *Bangsawan dan Kuasa, Kembalinya Para Nigrat di Dua Kota*. Yogyakarta: IRE Press.
- Fahmid, Imam Mujahidin. 2012. *Identitas Dalam Kekuasaan. Hibridasi Kuasa, Uang, dan Makna dalam Pembentukan Elite Bugis & Makassar*. Makassar: Innawa-ISPEI.
- Foucault, Michel. 1972. *The Archeology of Knowledge*. London: Tarvistock.
- . 1979. *Dicipline and Punish: The Birth of the Prisons*, Trans A. Sheridan. New York: Random House.
- . 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing*. Trans C. Gordon et al. New York: Pantheon Random House.
- . 1990. *The History of Sexuality Vol. I: An Introduction*. Trans Robert Hurley. London: Penguin.

- , 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa dan Pengetahuan*. Terjemahan, Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- , 2002a. *Menggugat Sejarah Ide. Terjemahan The Archaeology of Knowledge*. Di Indonesiakan I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City. New York: Doubleday.
- Goldman Alvin L. and Jacques Rojot. 2002. *Negotiation: Theory and Practice*. Amsterdam: Kluwer
- Habermas, Jürgen. 2007. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Diterjemahkan oleh Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. Cambridge: Polity Press.
- Hadiz, Vedi R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Markets*. London and New York: Routledge.
- Hindess, B. 1996. *Discourse of Power: From Hobbes to Foucault*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Hodge, E. K, and W. Anthony. 1988. "Interorganizational Resource exchange Network", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 69, hal. 211-223.
- Mills, S. 1999. *Discourse*. London: Routledge
- Parsons, Talcot *et al.* 1962. *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory*. Volume I. USA: The Free of Glencoe.
- Parsons, Talcot, and Shils, Edward. (Eds) 1965. *Toward A General Theory of Action*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pasewark, K.A. 1993. *A Theology of Power: Being Beyond Domination*. Minneapolis: Fortress Press.
- Pruitt, Dean G. dan J.Z. Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shils, E. 1972. *The Intellectual and the Powers and Other Essays*. London: The University of Chicago Press.
- Sjaf, Sofyan. 2014. *Politik Etnik Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Soewardi, Herman. 1998. *Nalar Kontemplasi dan Realitas (Revisi Besar)*. Bandung: PPs Universitas Padjadjaran
- Zuhro, R. Siti (ed.). 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.